



RENCANA KERJA (RENJA)



**KECAMATAN PONTANG
KABUPATEN SERANG TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pontang Tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai Rencana Kerja Kecamatan Pontang dalam kurun waktu Tahun 2026.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2026 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontang Tahun 2026 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Pontang, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pontang merupakan pencapaian Renstra Kecamatan Pontang Tahun 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amiin.

Pontang, 15 Juli 2025

CAMAT PONTANG



SAMSURI, S.E

NIP. 196801011987031005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Restra Kecamatan Pontang	7
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Riview Terhadap Rancangan Akhir RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Protrag dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB V PENUTUP	45



DAFTAR TABEL

- 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang s/d Tahun 2025 dan
Capaian Renstra Periode 2021 – 2026
- 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
- 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
- 3.1. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontang
- 3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2026
- 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam segala aspek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat, Keberhasilan pemerintah Kabupaten Serang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara dan daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, professional dan akuntabel sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan antara perencanaan dengan realisasi indikator Keluaran (output) dan Indikator Manfaat (Outcome) serta Indikator Hasil (Benefit).

Untuk mewujudkan aparatur negara yang professional serta memahami tugas dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, keterpaduan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Arah pembangunan yang tepat pada periode 5 (lima) tahun setelah Rencana Strategis Tahun 2016 sampai Tahun 2021 berakhir kemudian diteruskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 yang diwujudkan sesuai dengan Amanat Undang-undang melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Serang wajib untuk menyusun dan menetapkan arah dan tujuan selama Lima tahun kedepan yang di implementasikan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Periode 2021-2026.

Dengan perubahan yang cukup mendasar pada pola kerja sistem penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Aparatur Negara Daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Dalam mewujudkan arah dan tujuan Pembangunan di Bidang Pemerintahan Umum, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang berupaya dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima serta peningkatan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Disamping untuk membangun aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Umum Kecamatan Pontang Kabupaten Serang wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang melatarbelakangi maupun yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747); (ganti dengan RPJPD yang baru);
15. Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011- 2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembagian urusan pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
19. Peraturan Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis OPD Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026;
20. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Kabupaten Serang .

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2026 adalah untuk melaksanakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode 1 (satu) tahun dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yang pada saat dokumen rancangan RKPD Tahun 2026, Rancangan RKPD mengakomodir isu strategis yang di peroleh dari dokumen RPJMD 2021-2026, RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 serta mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2026 dimaksudkan untuk pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Serang pada Tahun 2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Serang pada Tahun 2026.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2026 untuk melaksanakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan untuk :

- i. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Pontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026;
- iii. Memperoleh pedoman dalam melaksanakan evaluasi kinerja pada akhir Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontang untuk memperjelas arah dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2026 Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang disajikan berdasarkan ketentuan C.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pontang dan Capaian Renstra Kecamatan Pontang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontang
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONTANG

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pontang
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONTANG

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Pontang

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah cukup baik, hal ini terlihat dari kesesuaian dari Rencana Kegiatan dengan Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Pencapaian Sasaran.

Pada Tahun 2025 Kecamatan Pontang Kabupaten Serang memiliki alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 4.715.905.724,- terdiri dari Belanja Pegawai, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.982.007.000,- dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.733.898.724,-. Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pontang pada Tahun 2025 sebesar Rp. 4.048.187.795,- (85,84%) dengan rincian untuk Belanja Pegawai, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 2.625.416.745,- (64,85%), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.422.771.050 (35,14%).

Adapun realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pontang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

i. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 3.355.585.188,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.994.399.497,00 (87,87%). Sasaran dari program ini yaitu Prosentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah, jasa penunjang dan pemeliharaan barang milik daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota TA. 2025 terdiri dari 6 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

ii. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 1.019.828.836,- dan realisasi anggaran adalah Rp. 899.872.590,- (88,24%). Sasaran dari program ini Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik TA. 2025 terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

iii. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 161.527.400,- dan realisasi adalah sebesar Rp. 102.855.100,- (63,68%). Sasaran dari program ini Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan TA. 2025 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 SubKegiatan yaitu :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

iv. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 3.600.000,- dan realisasi adalah Rp. 3.540.000,- (98,33%). Sasaran dari program ini Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum TA. 2025 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
 - b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

v. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 62.508.000,- dan realisasi adalah Rp. 53.189.200,- (85,09%). Sasaran dari program ini Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum TA. 2025 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nhinaka Tunggal Ika serta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

vi. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 112.856.300,- dan realisasi adalah Rp. 40.250.000,- (35,66%). Sasaran dari program ini Persentase Pemerintahan Desa yang Dibina. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa TA. 2025 terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONTANG s.d. TAHUN
2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERIODE TAHUN 2021-2026

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021 s.d. 2026 (Akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d th 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja PD Tahun 2024	Tingkat Realisasi Th. 2024(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Prosentase perencanaan dan penganggaran pelayanan administrasi keuangan, barang milik daerah dan administrasik umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	60 bln.	14 bln	14 bln	14 bln	100%	14 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Kec. Pontang Kab. Serang	60 bln.	19 org/bln.	19 org/bln.	19 org/bln.	100%	19 org/bln.	19 org/bln.	60%
2	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi barang milik daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya jasa keamanan kantor	60 bln.	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	100%	2 org/bln	36 bln	60%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	36 bln	60%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	36 bln	60%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan rumah tangga kantor	60 bln.	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	36 bln	60%
	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya makan dan minum	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%



	Kantor	rapat dan tamu								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi dalam/luar daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	60 bln.	0 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	24 bln	40%
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor (Meja, kursi dll)	60 bln.	unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	24 bln	40%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK dan benda pos Tersedianya jasa administrasi kantor	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 bln	60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 bln	60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan pramubakti	60 bln.	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 bln	60%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas atau lapangan	60 bln.	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	36 bln	60%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60 bln.	16 unit	16 unit	16 unit	100%	16 unit	36 bln	60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung dan bangunan kantor	60 bln.	1 unit	1 unit	1 unit	70%	1 unit	1 unit	20%
II	Program Penyelenggaraan	Cakupan penyelenggaraan kegiatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%



	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	pemerintahan tingkat kecamatan								
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan	60 bln.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	36 bln	60%
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya dukungan : - HUT Kabupaten - AKCF - BBGRM - Pemeliharaan Fasos/Fasum - Porkab	60 bln.	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	36 bln	60%
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di desa (Musrenbang Desa)	60 bln.	14 laporan	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	36 bln	60%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan : - P2TP2A - PKK - Isbat Nikah - Serang sehat	60 bln.	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	36 bln	60%
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya pemberdayaan kemsyarakatan	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UMKM)	60 bln.	laporan	laporan	laporan	100%	1 laporan	36 bln	60%
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%



		kecamatan								
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tokmas	60 bln.	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	60%
	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertika di wilayah kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan intansi vertika di wilayah kecamatan	60 bln.	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	36 bln	60%
v	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Nhinika Tunggal Ika serta, Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Peringatan HUT RI	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	3 keg	60%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan/dukungan : - Kegiatan Keagamaan - MTQ Tingkat Kecamatan/Kabupaten	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	36 bln	60%
vi	Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 bln.	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	36 bln	60%



	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 bln.	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	36 bln	60%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	60 bln.	12 bln	0 bln	0 bln	0%	0 bln	12 bln	20%
	Fasilitasi sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembanguna desa	Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PBBP2	60 bln.	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	36 bln	60%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Pontang sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan adalah Perangkat Daerah yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka pelayanan yang diberikan Kecamatan Pontang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan;
- b. Sinergitas antara OPD dan kecamatan;
- c. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
- d. Peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

No.	Indikator	Satuan	Target Restra Kecamatan Pontang				Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan/Analisa
			2023	2024	2025	2026		2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
I	Restra 2021-2026									
	Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Target tercapai dan proyeksi capaian kedepan optimis tercapai
	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/kelurahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	
	Persentase pemerintahan desa yang dibina	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berkaitan dengan rumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Serang, maka sesuai dengan permasalahan yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah Kecamatan Pontang pada kurun waktu 2021-2026, Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya adalah:

1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang :

Kantor Kecamatan Pontang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Serang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat, seperti Rekomendasi Surat Usaha Mikro maupun Domisili Perusahaan, rekomendasi SKCK, rekomendasi surat keterangan miskin, dan pelayanan administrasi penduduk lainnya. Kantor Kecamatan Pontang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media website Kecamatan Pontang, yakni adanya informasi kegiatan, persyaratan pelayanan di Kantor Kecamatan Pontang.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Kementrian Dalam Negeri mengharapkan peran dan fungsi kecamatan dapat memberikan nilai lebih dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 tentang Petunjuk teknisnya. Dimana dengan PATEN seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat akan berhenti/cukup di Kantor Kecamatan dalam seluruh proses pengurusannya.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pontang Kabupaten Serang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten

Serang berdasarkan azas otonomi maka Kantor Kecamatan Pontang melaksanakan kewenangan:

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
- b. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sehingga secara khusus terdapat keterkaitan langsung dan pembahasan secaramendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Serang .

4. Implikasi Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Kantor Kecamatan Pontang

Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kabupaten Serang , pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Kantor Kecamatan Pontang dalam menjalankan pelayanan terkait kewilayahan.

Dalam penentuan isu strategis Renstra Kantor Kecamatan Pontang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2021-2026. Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu :

- a. Belum adanya payung hukum daerah yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat ;
- b. Terbatasnya aparatur teknis yang menguasai keahlian tertentu ;
- c. Minimnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sehingga tidak dapat melaksanakan perawatan sarana dan prasarana kantor dengan optimal ;
- d. Lemahnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, sertaSKPD lain (Dinas, Badan, Kantor) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;

- e. Kerawanan keamanan dan ketertiban umum dengan di wilayah Kecamatan Pontang, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah ;

Selain itu juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kualitas / profesionalisme aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa yang masih rendah / kurang produktif ;
- b. Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa ;
- c. Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos ;
- d. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah ;
- e. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- f. Masih tingginya angka kemiskinan, karena income perkapita masyarakat masih rendah ;
- g. Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- h. Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong.

Sehingga dalam perencanaan periode 2021-2026, isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ;
 - a. Peningkatan kesejahteraan aparatur ;
 - b. Ciptakan Good and Clean Governance menuju Reformasi Birokrasi ;
 - c. Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
 - a. Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum / Masyarakat ;
 - b. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ;
 - b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ;
 - c. Peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.

2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas Daerah berdasarkan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026, adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan;
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan;
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pontang

No	Kode						Urusan/Bidang Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal Kecamatan			Hasil Analisis Kebutuhan		Sumber Dana
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Kebutuhan	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10
	7						URUSAN KEWILAYAHAN				5.195.549.568		5.230.500.000	
1	7	1	1			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kec. Pontang		3.805.549.568		2.055.000.000	
	7	1	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.129.770.998		3.175.500.000	
	7	1	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	Kec. Pontang	19 org/bln	3.129.770.998	19 org/bln	3.175.500.000	APBD
	7	1	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang milik Daerah			18.000.000		24.000.000	
	7	1	1	2.03	2		Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Kec. Pontang	3 org/bln	18.000.000	3 org/bln	24.000.000	APBD
	7	1	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah			173,000,000		200,000,000	
	7	1	1	2.06	2		Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pontang	1 paket	15,500,000	1 paket	25.000.000	APBD
	7	1	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pontang	1 paket	35,000,000	1 paket	50.000.000	APBD
	7	1	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kec.	1 paket	5,000,000	1 paket	15,135,000	APBD



	7	1	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan di kantor	Kec.Pontang	10 Dkumen	7,500,000	1 Paket	10.000.000	APBD
	7	1	1	2.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu	Kec. Pontang	2 paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	APBD
	7	1	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat, Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Kec. Pontang	2 paket	100,000,000	2 paket	100.000.000	APBD
	7	1	1	2.07			Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Pontang	-	-		100.000.000	APBD
	7	1	1	2.07	5		Pengadaan belanja modal	Tersedianya Printer dan Laptop ,barang electronic lainnya di kantor kec.pontang	Kec. Pontang	-	-	1 th	100.000.000	APBD
	7	1	1	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Pontang		190,000,000		202.159.848	
	7	1	1	2.08	1		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kec. Pontang	1 Dokumen	15,000,000	4 laporan	22.087.248	APBD
	7	1	1	2.08	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Pontang	3 lapran	25,000,000	3 laporan	33.072.600	APBD
	7	1	1	2.08	4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec. Pontang	7 rang	150.000.000	7 Orang	147,000,000	APBD
	7	1	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pontang	9 Laporan	55,000,000	9 laporan	150.000.000	APBD
	7	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Pontang	9 laporan	50,000,000.	9 laporan	75.000.000	APBD
	7	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pontang	9 laporan	5,000,000	9 laporan	5,000,000	APBD
	7	1	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pontang	-	-	2 laporan	70.000.0000	APBD



2	7	1	2		2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	Kec. Pontang	11 Laporan	1.070.000.000	11 Laporan	1.348.840.152	APBD
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pontang		20.000.000		48.840.152	APBD
	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pontang	11 Dokumen	20.000.000	11 Dokumen	48.840.152	APBD
	7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	Kec. Pontang		1,050,000,000.		1,300,000,000.	APBD
	7	01	02			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	Kec. Pontang	11 Laporan	1,050,000,000.	11 Laporan	1,300,000,000.	APBD
3	7	1	3		3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	Kec. Pontang		200.000.000		200.000.000	APBD
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pontang	11 laporan	200.000.000		200.000.000	APBD
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Pontang	1 lapora	30,000,000	1 laporan	30,000,000	APBD
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pontang	5 laporan	120,000,000	5 laporan	120,000,000	APBD
	7	1	3	201		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pontang	3 laporan	50,000,000		50,000,000	
	7	1	3	201	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Terlaksananya peningkatan ekonomi rakyat	Kec. Pontang	3 laporan	50,000,000	2 lapran	50,000,000	
4	7	1	4		4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Kec. Pontang	2 Laporan	20.000.000		30.000.000	APBD



	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pontang	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	30.000.000	APBD
	7	01	03	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pontang	2 laporan	10,000,000		15,000,000	APBD
	7	1	4	2.01	1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas	Kec. Pontang	2 laporan	10,000,000		15,000,000	APBD
5	7	1	5		5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kec. Pontang	5 laporan	189,778,570	5 laporan	200,000,000	APBD
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec Pontang	5 laporan	189,778,570	5 laporan	200,000,000	APBD
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. Pontang	5 laporan	69,778,570	5 laporan	80,000,000	APBD
	7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	Kec. Pontang	5 laporan	120,000,000	5 laporan	120,000,000	APBD
6	7	1	6		6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Pontang		150,000,000		160,000,000	APBD
		1	6	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec Pontang	11 laporan	150,000,000	11 laporan	160,000,000	APBD
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Tata pemerintahan Desa	Kec. Pontang		90,000,000		100,000,000	APBD
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di kec.pontang	Kec. Pontang	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	60.000.000	APBD



2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dalam menetapkan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui mekanisme musrenbang, baik tingkat desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

Catatan : Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang RKPD tidak termasuk tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun Ekonomi dan Reformasi Struktural”, pembangunan nasional 2026 diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:



- a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
 - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan dibawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
- b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
- c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
- d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
- e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
- f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
- g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
- h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2026, antara lain:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
- 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
- 3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
- 4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
- 5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
- 6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104 7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
- 7. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

1. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2026

Dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, terkait dengan arahan tentang kebijakan ekonomi diuraikan bahwa terdapat 5 (lima) misi yang terdapat pada RPJMD Provinsi Banten 2021- 2026 sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)
- 2. Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
- 3. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas
- 4. Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas
- 5. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Dari 5 (lima) misi diatas maka ditetapkanlah Rancangan tema RKPD 2026 Provinsi Banten yaitu "Pemantapan Daya Saing Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia". Sehingga prioritas pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
- 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
- 4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Maka Fokus Pembangunan Provinsi Banten yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
- ✓ Penguatan kelembagaan dan tatalaksana
- ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik
- ✓ Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur
- ✓ Tata kelola keuangan dan aset
- ✓ Penguatan penerapan SAKIP
- ✓ Peningkatan riset dan inovasi daerah
- ✓ Peningkatan Kolaborasi antar Level Pemerintahan



2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - ✓ Pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial
 - ✓ Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan
 - ✓ Pengentasan kemiskinan
 - ✓ Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda
 - ✓ Pembudayaan olahraga
 - ✓ Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat
 - ✓ Pelestarian kebudayaan daerah
3. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
 - ✓ Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
 - ✓ Pembangunan infrastruktur ekonomi
 - ✓ Pengembangan kawasan
 - ✓ Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana
 - ✓ Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan
4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
 - ✓ Pengendalian inflasi daerah
 - ✓ Pengembangan sektor unggulan
 - ✓ Revitalisasi Industri dan Perdagangan
 - ✓ Peningkatan investasi
 - ✓ Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
 - ✓ Pengembangan pariwisata
 - ✓ Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
 - ✓ Adopsi dan Inovasi IPTEK

2. **Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2026**

Isu strategis Kabupaten Serang tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat**

- Pandemi covid-19 membutuhkan inovasi dan penyesuaian metode pendidikan dan penyediaan sarpras pendukungnya;
- Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai baik dari kuantitas, kualitas maupun pemerataan ketersediaannya;
- Sumber daya manusia pendidik yang belum memadai dari segi kuantitas, kualitas maupun pemerataan ketersebarannya;
- Kurangnya peranserta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- Masih rendahnya minat baca masyarakat
- Sarana prasarana perpustakaan daerah kurang memadai dengan layanan masih bersifat manual dan belum menggunakan teknologi informasi

2. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

- Pandemi covid-19 dan berbagai penyakit menular serta tidak menular yang belum optimal dalam penanganannya
- Sarana prasarana fasilitas kesehatan yang belum memadai baik dari kuantitas, kualitas dan pemerataan ketersediaannya
- Sdm kesehatan yang belum terpenuhi dari segi kuantitas, kompetensi maupun pemerataan ketersebarannya
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih sehat
- Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan berbasis masyarakat masih belum optimal.
- Masih tingginya aki akb
- Tingginya prevalensi stunting



- Masih tingginya jumlah masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan
- Kualitas kesehatan lingkungan yang masih rendah
- Pelayanan KB yang belum optimal

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran Dan Pemulihan Perekonomian Pasca Covid -19

- Pandemi covid-19 yg berdampak pada penurunan daya beli masyarakat & peningkatan pengangguran karena kehilangan mata pencaharian / PHK
- Penanganan masalah kesejahteraan sosial yang belum optimal
- Belum adanya konsep pengembangan industri berbasis kawasan dan potensi unggulan daerah
- Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan mikro.
- Potensi sumber daya lokal belum diolah secara maksimal, padahal bahan bakuyang tersedia cukup memadai.
- Kualitas sdm yang bergerak di industri kecil belum optimal sehingga masih lemah dalam penerapan teknologi pengolahan.
- Belum optimalnya pengembangan, promosi dan pemasaran pariwisata di kabupaten serang
- Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan umkm di kabupaten serang.
- Kualitas produk umkm di kabupaten serang belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produk.
- Daya saing tenaga kerja yang masih rendah
- Daya saing investasi yang masih rendah
- Produktivitas pertanian dan perikanan yang belum optimal

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal
- Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah belum optimal.
- Sistem pengawasan kinerja pembangunan belum akuntabel berjalan secara optimal, karena lemahnya pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah
- Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal (ktp, kta, kartu kematian, dsb)
- Tingkat pemahaman masyarakat rendah akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Pembangunan desa belum berlangsung optimal, karena perencanaan tidak berbasis potensi desa hanya berfokus pada serapan anggaran saja, orientasi pembangunan desa berfokus pada infrastruktur, belum optimalnya pendamping pengelola keuangan desa.



- Sumber daya aparatur sipil negara yang belum memadai dari segi kuantitas kualitas maupun pemerataan ketersebarannya
- Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana
- Pengelolaan arsip daerah yang belum terpadu dan menggunakan kaidah baku kearsipan

5. Pengembangan Infrastruktur Pelayanan Dasar

- Sarana prasarana air bersih yang belum memadai
- Sarana prasarana sanitasi yang belum memadai
- Sarana prasarana pendidikan yang belum memadai
- Sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memadai
- Belum terbangunnya pusat pemerintahan kabupaten
- Masih adanya jalan, irigasi, spam, pengelolaan air limbah yang bermanfaat besar bagi masyarakat dalam kondisi kurang baik
- Belum memadainya fasos fasum di tingkat kecamatan

6. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang, Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana

- Penyediaan sarana prasarana dan utilitas umum masih belum memadai.
- Kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta untuk perbaikan lingkungan permukiman belum berjalan dengan baik.
- Fasilitas penyediaan perbaikan rumah tidak layak huni masih terbatas.
- Fasilitas penanganan persampahan rumah tangga masih terbatas pada daerah tertentu.
- Fasilitas persampahan daerah dalam kondisi yang full kapasitas dan membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung.
- Kondisi ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sebagian besar dalam kondisi tidak memadai.
- Pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum menyeluruh dan penegakan hukumnya cenderung berjalan lambat.
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial.

7. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Belum optimalnya pemahaman tentang pengarusutamaan hak anak
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Rancangan Tema RKPD 2026 Adalah: “Pemantapan Sumber Daya Manusia Dan Pemulihan Perekonomian Kabupaten Serang Pasca Pandemi Covid-19 Yang Didukung Oleh Pembangunan Sarana Prasarana Yang Memadai”. Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlaq
2. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kondisi Sarana Prasarana dan Pemerataan Pembangunan
4. Pemulihan Perekonomian Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pontang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka panjang menengah Kecamatan Pontang selama 5 tahun anggaran sampai Tahun 2026 adalah “Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik”.

B. Sasaran

Sasaran mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontang

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2024	2024	2025	2026
	Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan dan pelayananpublic	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

3.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2026 adalah Visi dan Misi Kabupaten Serang sebagai berikut :

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”.

2. Misi

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima”

B. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Pontang Tahun 2026 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pontang merumuskan 6 (enam) program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 20 (Dua puluh) Sub kegiatan. Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Kecamatan Pontang Tahun 2026

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

	Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	- Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Kewenangan lain yang Deilimpahkan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Singkronisasi Program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan. - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pontang untuk Tahun 2026 adalah sebesar Rp. 5.027.735.848,- secara rinci pendanaan Tahun 2026 termuat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027
Kecamatan Pontang Kabupaten Serang

NO	Kode					Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9
	7					URUSAN KEWILAYAHAN				5.027.735.848		5.243.118.950
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas aparatur Kecamatan pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Kec. Pontang		4.377.139.712		5.243.118.950
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pontang		3.570.763.000		3.225.770.998
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pembayaran gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Kecamatan Pontang Kabupaten Serang	Kec. Pontang	1 Thn	3.570.763.000	1 Tahun	3.225.770.998
	7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang milik Daerah	Kec. Pontang		-		18.000.000
	7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah	Kec. Pontang	1 Thn	-	1 Tahun	18.000.000
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pontang		52.107.644		134,569,382
	7	1	1	2.06	2	Peyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kec. Pontang	1 Thn	12.350.500	1 Thn	10,500,000
	7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pontang	1 Thn	9.536.000	1 Thn	20,000,000
	7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pontang	1 Thn	415.144	1 Thn	1,569,382
	7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Pontang	1 Thn	3.600.000	1 Thn	7,500,000
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	Kec. Pontang	1 Thn	1.306.000	1 Thn	10.000.000



	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minum rapat	Kec. Pontang	1 Thn	24.900.000	1 Thn	85.000.000
							Terlaksananya Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah					
	7	1	1	2.07		Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Kec. Pontang		-		100.000.000
	7	1	1	2.07	5	Pengadaan belanja modal	Tersedianya Printer dan Laptop ,barang electronic lainnya di kantor kec.pontang	Kec. Pontang			1 Thn	100,000,000
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Pontang		180,000,000		190,000,000
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kec. Pontang		5,000,000		5,000,000
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Internet Kantor	Kec. Pontang	1 Thn	25,000,000	1 Thn	25,000,000
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pramubakti, kebersihan dan keamanan	Kec. Pontang	1 Thn	150.000.000	1 Thn	150.000.000
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pontang		55,000,000		55,000,000
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Kec. Pontang	11 Unit	50,000,000.	9 Unit	50,000,000.
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Pontang	1 Thn	5,000,000	1 Thn	5,000,000
	7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pontang	1 Thn		1 Thn	70.000.0000
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	Kec. Pontang		1.165.999.131		1.070.000.000
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pontang		20.000.000		20.000.000



	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pontang	1 Thn	20.000.000	1 Thn	20.000.000
	7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pontang		1.145.999.131		1.145.999.131
	7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan yang dilimpahkan	Kec. Pontang	6 Keg	1.145.999.131	6 Keg	1.145.999.131
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	Kec. Pontang		200.000.000		200.000.000
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pontang		200,000,000		200,000,000
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan	Kec. Pontang	1 Thn	30,000,000	1 Thn	30,000,000
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pontang	3 Keg	120,000,000	3 Keg	120,000,000
	7	1	3	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pontang	3 laporan	50,000,000		50,000,000
	7	1	3	2.01	3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananaya peningkatan ekonomi rakyat	Kec. Pontang	3 laporan	50,000,000	2 lapran	50,000,000
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	Kec. Pontang		20,000,000		20,000,000
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pontang		20.000.000		20.000.000
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pontang	1 Thn	10,000,000	1 Thn	10,000,000
	7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan toga dan tomas	Kec. Pontang	1 Thn	10,000,000	1 Thn	10,000,000



5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Kec. Pontang		189,778,570		189,778,570
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pontang		189,778,570		189,778,570
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan	Kec. Pontang	1 Thn	69,778,570	1 Thn	69,778,570
	7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku, dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	Kec. Pontang	4 Keg	120,000,000	1 Thn	120,000,000
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Pontang		150,000,000		150,000,000
		1	6	2.01		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, Koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Kec. Pontang	11 desa	150,000,000	1 Thn	150,000,000
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Tata pemerintahan Desa	Kec. Pontang	11 desa	90,000,000	1 Thn	90,000,000
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa di Kec. Pontang	Kec. Pontang	3 desa	60.000.000	3 desa	60.000.000



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pontang Kabupaten Serang ini disusun dengan memperhatikan segala aspek, internal maupun eksternal. Upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi suatu tuntutan, begitu pula halnya dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur terkait. Disamping kemampuan memanfaatkan peluang yang terbuka dan meminimalisasi ancaman yang menghadang.

Penyusunan rencana kerja Kecamatan Pontang ini diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut diatas, melalui perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang menantang sekaligus realistis dapat tercapai.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Tahun 2025 dijadikan Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tahun 2025. Renja Kecamatan Pontang padaintinya memuat rencana-rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, analisa kinerja pelayanan, tugas pokok dan fungsi serta target-target yang ditetapkan dalam renstra, Renja Kecamatan Pontang selanjutnya dipergunakan untuk merumuskanpenganggaran Satuan Kerja Kecamatan Pontang pada Tahun 2025 yang diharapkan dapat terjadi konsistensi antara penganggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan, guna membantu pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pontang ini disusun dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, dimana penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga memberikan pelayanan yang prima dan nilai yang positif bagi masyarakat Kecamatan Pontang, dan dapat bermanfaat kepada masyarakat Kabupaten Serang secara khusus nantinya.

Pontang, 15 Juli 2025
CAMAT PONTANG


SAMSURI, S.E
NIP. 196801011987031005